PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN DELIMA

Alamat Jalan t.Raja Husen No. 1 Reubee Kode Pos : 24162

Telepon... Faksimil... E-mail...

SURAT KEPUTUSAN CAMAT DELIMA KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 050/ / TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KANTOR CAMAT DELIMA TAHUN 2023

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023 maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja);
b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dan RPJM Daerah perlu menetapkan peraturan Camat Delima Tahun 2023;
d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu membentu Panitia di Tingkat Kecamatan dan Ditetapkan dalam suatu Surat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI No. 104 Tahun 2004)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 463)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 470
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679).

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).
10. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otanomi Khusus, sebagaimana telah diobah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008 – 2027
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petujuk Pelaksanaan Pajak Aceh.
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022.
19. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie.
20. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie.
21. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupten Pidie Tahun 2017-2022.
22. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Pidie Tahun 2022.

Memperhatikan Surat Bupati Pidie Nomor : 050/240, Tanggal 20 Januari 2023Bertepatan dengan 01 Jumadil Akhir 1442 H, Perihal Permintaan tim Penyusunan Renja SKPD Tahun 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Menunjuk/Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Tahun 2023, dengan personalia sebagaiman tersebut dalam daftar terlampir,

Kedua : Tim sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama bertugas mempersiapkan Renca Kerja Kecamatan Delima Tahun 2023
Melaporkan Hasil Kerjanya kepada Camat

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Bertanggung Jawab Kepada Camat Kecamatan Delima.

Keempat : Semua biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebaankan pada DPA Kecamatan Delima Tahun 2023.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila ternyata terdapat kekeliruan dalam penepatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetap di : Delima
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
Camat Delima

KARNIADI, S.Sos
Penata Tk I
NIP.19760507 199911 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT DELIMA
Nomor : 050 / / SK/2023
Tanggal : 20 Februari 2023

SUSUNAN PANITIA RENCANA KERJA
KANTOR CAMAT DELIMA KABUPATEN PIDIE

No.	NAMA	JABATAN ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	KARNIADI, S.Sos	CAMAT	KETUA
2.	MUHAMMAD FAJRI,S.STP,M.Si	SEKCAM	WAKIL KETUA
3.	NOFITA, S.Sos	KASUBBAG KEUANGAN	SEKRETARIS
4.	ZULKARNAINI, SE	KASUBBAG UMUM	ANGGOTA
5.	NURLINA	BENDAHARA	ANGGOTA

Ditetap di : Delima
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
Camat Delima

KARNIADI, S.Sos
Penata Tk I
NIP.19760507 199911 1 001